

**PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
DALAM PENANGGULANGAN KRIMINALITAS
DI DESA TERBANGGI BESAR LAMPUNG TENGAH**

Skripsi

**SAPTO PRASETYO
NPM. 1631090126**



**Program Studi: Sosiologi Agama
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
DALAM PENANGGULANGAN KRIMINALITAS
DI DESA TERBANGGI BESAR LAMPUNG TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**

Oleh

**SAPTO PRASETYO
NPM. 1631090126**

Program Studi: Sosiologi Agama

Pembimbing I : Dr. Idrus Ruslan, M.Ag

Pembimbing II : Ellya Rosana, S.Sos, M.H

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Kriminalitas merupakan suatu tingkah laku yang melanggar norma sosial, undang-undang pidana, dan bertentangan dengan moral kemanusiaan, serta bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat. Perlu adanya peran dari pihak kepolisian untuk meminimalisir angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana bentuk-bentuk kriminalitas yang terjadi di Desa Terbanggi Besar?, Bagaimana peran POLSEK Terbanggi Besar dalam penanggulangan kriminalitas yang terjadi di Desa Terbanggi Besar?, Apa sajakah kendala yang sering dihadapi oleh POLSEK Terbanggi Besar dalam menanggulangi kriminalitas?. Penelitian ini dilaksanakan di POLSEK Terbanggi Besar dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini meliputi upaya dari POLSEK Terbanggi Besar dalam menanggulangi kriminalitas di Desa Terbanggi Besar Lampung Tengah secara preventif dan represif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kriminalitas yang terjadi di Desa Terbanggi Besar yaitu pencurian, penganiayaan, pemerkosaan/pencabulan, pemerasan, perjudian, penipuan, penyalahgunaan senjata api, narkoba, senjata tajam, dan pengrusakan. Bentuk-bentuk tindak kejahatan tersebut sering terjadi karena faktor rendahnya tingkat ekonomi, faktor pendidikan rendah, faktor lingkungan dan penegakkan hukum. Peran POLSEK Terbanggi Besar dibagi menjadi 2 yaitu melalui upaya preventif pihak kepolisian melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi di masyarakat, memasang benner yang berisi himbauan, razia selektif, penjagaan dan patroli rutin kepolisian. Upaya represif POLSEK Terbanggi Besar menangkap dan memberikan sanksi hukum terhadap pelaku kriminal agar mereka merasa jera. Kendala yang dihadapi POLSEK Terbanggi Besar yaitu; minimnya saksi di lokasi kejadian, kurangnya kesadaran dari masyarakat, jam-jam rawan kejahatan yang tidak menentu dan kurangnya personil di POLSEK Terbanggi Besar. Oleh karena itu dari pihak POLSEK perlu adanya penambahan personil anggota agar kinerja POLSEK Terbanggi Besar bisa lebih baik lagi dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan, kemudian dari pihak masyarakat diharapkan mampu bekerja sama dengan pihak keamanan dimulai dari kesadaran untuk melapor dan juga lebih berhati-hati dalam meletakkan barang berharganya.

Kata Kunci:

POLSEK dan Kriminalitas

PERNYATAAN KEASLIAN/ ORISINALITAS

Assalamualaikum wr.wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sapto Prasetyo
NPM : 1631090126
Program Studi : Sosisologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM PENANGGULANGAN KRIMINALITAS DI DESA TERBANGGI BESAR LAMPUNG TENGAH. Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya bukan hasil penelitian orang lain. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamualaikum, wr.wb.

Bandar Lampung, 4 Februari 2021

Yang Menyatakan

Materai Rp. 6000,-

Sapto Prasetyo
NPM. 1631090126



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukrame I Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul/Skripsi : Peran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dalam
Penanggulangan Kriminalitas di Desa Terbanggi Besar
Lampung Tengah
Nama : Sapto Prasetyo
NPM : 1631090126
Jurusan : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Agama

MENYETUJUI

**Untuk Di Munaqosahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Ushuluddindan Studi Agama Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Dr. Idrus Ruslan, M.Ag
NIP. 197101061997031003

Pembimbing II

Ellya Rosana, S. Sos, M.H
NIP. 197412231999032002

Ketua

Program Studi Sosiologi Agama

Siti Badi'ah, S.Ag., M.Ag
NIP.197712252003122001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarama I Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dalam Penanggulangan Kriminalitas di Desa Terbanggi Besar Lampung Tengah”. Disusun oleh: Sapto Prasetyo, NPM: 1631090126, Jurusan: Sosiologi Agama. Telah diajukan dalam siding Munaqosyah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Februari 2021.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang : Dr. Shonhaji, MAG

(.....)

Sekretaris : Faisal Adnan Reza, S.Psi., M.Psi., Psikolog

(.....)

Penguji Utama : Dr. Suhandi, MAG

(.....)

Penguji I : Dr. Idrus Ruslan, M.Ag

(.....)

Penguji II : Ellya Rosana, S.Sos, M.H

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**

**Dr. M. Afif Anshori, M.Ag
NIP.1960031319890314004**

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ – ١٠٤

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

(QS. Ali-Imran (3) : 104)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kuasa-Nyayang telah memberikan kemampuan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat serta kuasa-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada orang-orang terkasih yaitu:

1. Teruntuk Ayahanda Tukiran dan Ibunda Sri Atun tercinta yang telah mengasuh, menyayangi dan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa. Senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Berkat do'a keduanya sehingga peneliti dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu di berikan kesehatan dan kebahagiaan atas apa yang telah kalian berikan kepada saya, serta berharap dengan selesainya semua ini akan menjadi hadiah untuk kedua orang tua saya.
2. Teruntuk Adikku Abdurrohman Syaputra yang selalu memberikan motivasi dan semangat, serta Nurbaiti Meti Puspitasari kekasih tercinta yang selalu mendo'akan dan memberi semangat serta motivasi bagi keberhasilan saya selama studi.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Sapto Prasetyo, dilahirkan di Desa Rejo Katon Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 25 September 1997. Peneliti adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Terlahir dari pasangan yang harmonis dan selalu bahagia yaitu Bapak Tukiran dan Ibu Sri Atun. Pendidikan dimulai dari SD IT Bustanul Ulum dan selesai pada tahun 2010. SMP IT Bustanul Ulum selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke SMAN 1 Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan Selesai Pada tahun 2016. Melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun ajaran 2016/2017. Dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos) pada tahun 2020 peneliti menulis skripsi dengan judul Peran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam Penanggulangan Kriminalitas di desa Terbanggi Besar Lampung Tengah. Semoga ilmu yang selama ini didapat di UIN Raden Intan Lampung bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi masyarakat sekitar.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga sampai saat ini peneliti diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam peneliti curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Berkat rahmat dan karunia dari Allah SWT, peneliti berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya berupa skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) program studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada ilmu Ushuluddin dan Studi Agama. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ungkapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Bapak Dr. M. Afif Anshori, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Siti Badiah, M.Ag dan Bapak faisal Adnan Reza, M.Psi, Psikologi selaku Ketua Proram Studi dan Sekertaris Program Studi Sosiologi Agama.

4. Bapak Dr. Idrus Ruslan, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan sumbangan pemikiran kepada peneliti sehingga tersusun skripsi ini.
5. Ibu Ellya Rosana, S. Sos., M.H selaku pembimbing II yang telah sabar dan memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat.
7. Bapak Drs. Sutana Yusuf, M.Kom. I. selaku Kepala POLSEK Terbangi Besar yang telah memberikan izin kepada peneliti dan membantu dalam memberikan informasi terkait dengan penelitiannya.
8. Bapak Haidir S.T. selaku kepala desa Terbanggi Besar yang telah memberikan izin dan membantu memberikan informasi terkait dengan penelitian.
9. Kepada masyarakat desa Terbanggi Besar yang telah memberi bantuan selama diadakannya penelitian.
10. Teman seperjuangan Sosiologi Agama angkatan 2016, khususnya Mutia Fardita dan Siti Maya Asmara serta teman-teman kelas C yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, terimakasih atas saran dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga jasa-jasa mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan bagi yang membaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Latar Belakang	4
D. Fokus Penelitian.....	10
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan Penelitian	11
G. Signifikasi Penelitian	11

H. Tinjauan Pustaka.....	12
I. Metode Penelitian	15

BAB II PERAN KEPOLISIAN DAN KRIMINALITAS

A. Peran	24
1. Definisi Peran	24
2. Jenis-Jenis Peranan.....	25
3. Perbedaan Kedudukan dengan Peran	26
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	27
1. Definisi POLRI.....	27
2. Tugas dan Fungsi POLRI	28
C. Kriminalitas.....	31
1. Pengertian Kriminalitas	31
2. Bentuk dan Jenis Kriminalitas	32
3. Faktor-Faktor Penyebab Kriminalitas.....	33
4. Cara Menanggulangi Kriminalitas	35
D. Teori Fungsionalisme Struktural	40

BAB III DESKRIPSI DESA TERBANGGI BESAR DAN POLSEK TERBANGGI BESAR LAMPUNG TENGAH

A. Desa Terbanggi Besar Lampung Tengah	43
1. Sejarah Desa Terbanggi Besar	43
2. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Terbanggi Besar	47
3. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Terbanggi Besar.....	51

4. Kondisi Kriminalitas di Desa Terbanggi Besar	52
B. Polsek Terbanggi Besar Lampung Tengah	52
1. Sejarah Berdirinya Polsek Terbanggi Besar Lampung Tengah	52
2. Struktur Organisasi Polsek Terbanggi Besar Lampung Tengah	54
3. Prestasi Polsek Terbanggi Besar Dalam Menangani Tindak Kriminalitas.....	57
 BAB IV PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM PENANGGULANGAN KRIMINALITAS DI DESA TERBANGGI BESAR LAMPUNG TENGAH	
A. Bentuk-Bentuk Tindak Kriminal yang Sering Terjadi di Desa Terbanggi Besar.....	62
B. Peran POLSEK Terbanggi Besar dalam Menanggulangi Kriminalitas di Desa Terbanggi Besar	66
C. Kendala-kendala POLSEK Terbanggi Besar dalam Menanggulangi Kriminalitas.....	69
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	73
B. Rekomendasi.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :Sisilah Kepemimpinan Desa Terbanggi Besar

Tabel 2 : Komposisi Jumlah Penduduk Terbanggi Besar Berdasarkan Dusun

Tabel 3 : Komposisi Pendidikan Penduduk Desa Terbanggi Besar

Tabel 4 : Catatan Kriminal POLSEK Terbanggi Besar 2019-2020

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 : Surat Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

Lampiran 4 : Surat Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah

Lampiran 5 : Surat Balasan dari POLSEK Terbanggi Besar

Lampiran 6 :Kartu Konsultasi

Lampiran 7 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan istilah ini, peneliti memberikan penjelasan-penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi agar tidak terjadi kesimpang siuran makna. Maka dari itu, peneliti merasa sangat perlu untuk menjelaskan istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu :
“PERANKEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)DALAM PENANGGULANGAN KRIMINALITASDI DESA TERBANGGI BESAR LAMPUNG TENGAH.”

Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan berdasarkan posisi sosial, baik itu dengan secara formal maupun informal. Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu kejadian atau peristiwa, serta merupakan suatu pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat. Menurut Soekanto, arti peran yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau juga kedudukan yang disandang. Status serta kedudukan tersebut sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam tindakan semuanya itu

disesuaikandengan peran yang berbeda.¹ Peran dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh POLSEK Terbanggi Besar dalam menanggulangi kriminalitas, mulai dari sosialisasi langsung kepada masyarakat desa hingga penangkapan dan pemberian sanksi hukum terhadap pelaku kriminal.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.² Penelitian ini, peneliti mengkhususkan kepada POLSEK yang berada di wilayah Terbanggi Besar lampung Tengah.

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan kriminalitas dapat dilakukan secara preventif dan represif.³ Penanggulangan secara preventif dalam penelitian ini berupa penyuluhan dan

¹Seputar Pengetahuan, "Peran : Pengertian, Menurut Para Ahli, Konsep dan Jenisnya". (Online), tersedia di : <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2019/10/peran.html> (28 April 2020).

²Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Th 2002. *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. (diakses 10 Desember 2018).

³Ray Pratama, *Upaya Penanggulangan Kejahatan*, Tersedia di: <http://raypratama.blogspot.com>, (29 November 2020).

sosialisasi kepada masyarakat Desa Terbanggi Besar, sedangkan penanggulangan secara represif dalam penelitian ini yaitu berupa penangkapan dan pemberian sanksi hukum terhadap pelaku kriminal agar mereka merasa jera.

Kriminalitas berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan. Bisa disebut kriminalitas karena ia menunjukkan suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan. S. Wojowasito dan W.J.S. Poerwadarminta mengartikan bahwa *crime* adalah kejahatan dan *criminal* dapat diartikan jahat atau penjahat, maka kriminalitas dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan.⁴ Kriminalitas dalam penelitian ini adalah suatu tindakan kejahatan yang merugikan warga Terbanggi Besar seperti pencurian, pembegalan, pembunuhan dan pemerasan atau pemalakan.

Desa Terbanggi Besar adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Terbanggi Besar termasuk dalam Kabupaten Lampung Tengah, Desa Terbanggi Besar merupakan desa induk yang jumlah penduduknya paling banyak dan rata-rata merupakan pribumi asli.

Maksud dari judul ini adalah upaya yang dilakukan oleh POLSEK Terbanggi Besar dalam mengatasi tindak kejahatan seperti pembegalan, pemalakan, pencurian dan pembunuhan yang dilakukan secara preventif dan represif kepada para pelanggar.

⁴ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung : Remadja Karya CV, 1987), h. 11.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Masih banyaknya tindak kriminal di Desa Terbanggi Besar, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian agar dapat mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak kriminal dan berusaha untuk mencari solusi dalam menanggulangi dari masalah tersebut.

2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini didukung dengan literatur yang menunjang, baik yang tersedia di pustakaan ataupun sumber lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian, selain itu kajian lokasi penelitian ini merupakan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan peneliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait kriminalitas.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara hukum, yang dimaksud dengan Negara Hukum tersebut ialah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.⁵Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia yang juga

⁵ Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasyarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, (Jakarta : Sekjen MPR RI, 2009), h. 46.

merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini mengartikan bahwa segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Republik Indonesia haruslah berlandaskan dan bercermin dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang merupakan hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia mempunyai atau memiliki penjabaran-penjabaran hukum yang telah dibuat oleh pemerintah, guna mengatur atau membatasi hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik hubungan antara masyarakat secara individu maupun secara berkelompok dan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.

Berbicara mengenai masyarakat otomatis kita telah berbicara tentang kehidupan manusia, yaitu hubungan sosial antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, yang merupakan *zoon politikon* atau yang dikenal dengan bahasa Indonesia yaitu makhluk sosial. Hal ini mengartikan bahwa manusia dalam kehidupan bermasyarakat saling membutuhkan dan saling ketergantungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Karena adanya hubungan manusia satu dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat akan mengakibatkan dua akibat, yaitu akibat baik dan akibat tidak baik dari pada hubungan tersebut. Akibat yang baik di atas akan menimbulkan hasil yang baik dan akibat yang tidak baik akan menimbulkan masalah bagi masyarakat dan pemerintah dalam hal ini penegak hukum.

Hal-hal yang menimbulkan masalah bagi pemerintah dalam hal ini penegak hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat baik itu secara individu maupun secara berkelompok telah melakukan tindak kejahatan atau melanggar hak-hak orang lain

dan tidak mentaati peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah.

Beberapa pandangan para ahli hukum dan kriminologi, seperti Wahyu Mulyono mengemukakan bahwa: mengamati dan memahami kejahatan tidaklah mudah. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dapat dilihat dari berbagai sudut yang berbeda. Karena itu, tidak mengherankan kalau dalam suatu kejahatan terdapat berbagai komentar yang berbeda-beda. Sejak sebelum masehi sampai sekarang, para filosofi dan para pakar berusaha memahami dan mencari darimana sumber kejahatan itu. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa sumber kejahatan adalah emas, kemiskinan dan kekuasaan.⁶

Selanjutnya Topo Santoso mengemukakan bahwa usaha memahami kejahatan itu telah berabad-abad yang lalu dikerjakan oleh ilmuwan terkenal, yaitu Plato (427-347 SM) yang menyatakan dalam bukunya “Republiek” bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. Aristoteles (382-322 SM) mengatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak dilakukan untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup tetapi untuk kemewahan. Pendapat para ahli tersebut di atas kemudian tertampung dalam suatu ilmu yang disebut dengan “kriminologi”. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Hingga kini batasan

⁶ Wahyu Mulyono, *Pengantar Teori Kriminologi*. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012), h. 3.

dan ruang lingkup kriminologi masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (sarjana-sarjana).⁷

Pendapat ketiga pakar yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa kejahatan dapat ditinjau dari berbagai aspek dan untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan itu juga mengundang banyak perdebatan. Kejahatan tidak dapat dimusnahkan atau dilenyapkan, tetapi dengan mengetahui penyebabnya, kejahatan itu dapat ditanggulangi sehingga keberadaannya berkurang.

Kejahatan masih sering terjadi di Negara Republik Indonesia, demikian pula halnya di Kabupaten Lampung Tengah khususnya di Kecamatan Terbanggi Besar Desa Terbanggi Besar. Pemerintah dalam hal ini membuat undang-undang yang mengatur mengenai pasal-pasal dan sanksi-sanksi terhadap pelaku kejahatan. Adapun sanksi-sanksi dari tindak kejahatan misalnya Pencurian, diatur dalam pasal 362 KUHP dengan sanksi hukumnya paling lama 5 tahun penjara dengan denda, Sembilan ratus rupiah; Pembunuhan, diatur dalam pasal 338 KUHP dengan sanksi paling lama 15 tahun penjara; Pemalakan, diatur dalam pasal 368 ayat 1 dengan sanksi paling lama 9 tahun penjara; dan Pembegalan, diatur dalam pasal 365 dengan sanksi paling lama 15 tahun penjara.

“Bentuk kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, pemerkosaan/pencabulan, pemerasan, perjudian, penipuan, narkoba, senjata tajam, pengrusakan dan penyalahgunaan senjata api masih sering terjadi di Kabupaten Lampung Tengah

⁷Topo Santoso dan Eva, *Kriminologi*. (Jakarta : R. Grafindo Persada, 2004), h. 1-2.

khususnya di Kecamatan Terbanggi Besar Desa Terbanggi Besar.”⁸ Menurut pengamatan peneliti banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di atas timbul karena kesenjangan sosial dan pengangguran. Sehingga, timbullah niat untuk mencuri, memalak, membegal bahkan sampai membunuh korbannya. “Kejahatan ditiap lingkungan merupakan lawan negatif dari norma-norma kelakuan yang berlaku di dalam organisasi lingkungan tersebut, yaitu bergantung pada organisasi-organisasi dan kebudayaan lingkungan itu.”⁹

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan satu-satunya instansi yang diberikan wewenang dan tanggungjawab oleh undang-undang, pada setiap anggota POLRI secara individu dengan tidak membedakan pangkat dan jabatan diberi kewenangan penuh untuk menegakkan hukum sebagai upaya pencegahan sampai dengan penindakan hukum terhadap segala tindak pidana kejahatan. Pada penelitian ini, peneliti mengkhususkan POLRI pada POLSEK yang berada di wilayah Terbanggi Besar. Sebagai satu kesatuan dalam kebijakan kriminal dan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dengan tujuan utama memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama. Tindak kejahatan yang terjadi selama ini sudah mencapai batas yang dikhawatirkan, yang dampaknya secara luas dapat meresahkan masyarakat, karena tindak kejahatan yang sering terjadi jarang disertai dengan tindakan penganiayaan serta perlakuan

⁸Sutana Yusuf, Kepala POLSEK Terbanggi Besar, *Wawancara*, Tanggal 14 Oktober 2020.

⁹ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung : Remadja Karya CV, 1987), h. 43.

kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Sehingga peristiwa-peristiwa semacam itu kemudian menimbulkan trauma bagi masyarakat sekitar.

Jelas tampak bahwa pelaku tindakan itu mempunyai motif dan alasan-alasan tertentu, alasan-alasan tersebut adalah demi kepuasan hatinya bisa juga karena adanya kesenjangan sosial, dimana semakin banyak penduduk miskin lantaran krisis ekonomi yang berkepanjangan yang terjadi selama ini. Hal ini dapat memicu timbulnya tindakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian material akibat dari tindakan tersebut.

POLSEK Terbanggi Besar sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan yang berada di wilayah Terbanggi Besar yang mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat, dengan demikian POLSEK Terbanggi Besar mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan di wilayah Terbanggi Besar. Di samping hal tersebut, dalam tugasnya, POLSEK Terbanggi Besar berada dalam dua posisi yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum adalah menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, namun demikian keberhasilannya tak pernah lepas dari peran serta masyarakat dalam pencapaian tujuan demi tertib hukum.

Sesuai dengan uraian tersebut serta memperhatikan pentingnya permasalahan berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana yang sering terjadi selama ini khususnya wilayah hukum POLSEK Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten

Lampung Tengah maka peneliti tertarik untuk menganalisis peranan POLRI terhadap persoalan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pokok permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam pendekatan kualitatif. Hal ini karena suatu penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seorang terhadap adanya masalah.¹⁰

Fokus penelitian perilaku kriminal di Desa Terbanggi Besar Lampung Tengah, meliputi upayadari POLSEK Terbanggi Besar dalam menanggulangi kriminalitas di Desa Terbanggi Besar Lampung Tengah baik secara preventif dan represif sehingga dapat meminimalisir tindakan kriminalitas yang terjadi.

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk kriminalitas yang terjadi di Desa Terbanggi Besar ?
2. Bagaimana peran POLSEK Terbanggi Besar dalam penanggulangan kriminalitas yang terjadi di Desa Terbanggi Besar ?
3. Apa sajakah kendala yang sering dihadapi oleh POLSEK Terbanggi Besar dalam menanggulangi kriminalitas ?

¹⁰ Maleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 92.

F. Tujuan Masalah

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kriminalitas yang terjadi di Desa Terbanggi Besar.
2. Untuk mengetahui peran POLSEK Terbanggi Besar dalam penanggulangan kriminalitas di Desa Terbanggi Besar.
3. Untuk mengetahui kendala yang sering dihadapi oleh POLSEK Terbanggi Besar dalam menanggulangi kriminalitas.

G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoretis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dilaksanakan untuk mengembangkan teori sosiologi kriminalitas dan juga arah dan masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai bagaimana peran POLSEK Terbanggi Besar dalam menanggulangi kriminalitas di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten

Lampung Tengah dan pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terkait khususnya di dalam meningkatkan keamanan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

c. Bagi UIN Raden Intan Lampung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kepustakaan yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan penulisan karya ilmiah selanjutnya.

H. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan informasi dasar atau rujukan yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan survei yang penulis lakukan, ada beberapa kajian yang telah diteliti oleh peneliti lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Hardianto F.N. (2009) tentang "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi". Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang faktor yang

mempengaruhi seseorang melakukan tindak kriminalitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat kuantitatif, sekunder, dan crosssection, berdasarkan teknik pengumpulan data tinjauan literatur dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan publikasi lain yang terkait, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Lokasi dalam penelitian ini adalah mencakup 26 provinsi di Indonesia dari data BPS tahun 1997, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berada di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Perbedaan yang lain adalah dilihat dari bidang kajiannya, jika penelitian ini mengkaji mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia, sedangkan peneliti akan meneliti tentang peran POLSEK dalam penanggulangan kriminalitas di desa Terbanggi Besar.

2. Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Alifi (2016) tentang “Perilaku Kriminal Pada Pemuda Di Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah”. Penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama ingin melihat bentuk-bentuk tindakan kriminalitas dan metode pengumpulan yang dilakukan juga sama yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah perbedaan tempat dan fokus permasalahan. Lokasi pada penelitian ini berada di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berada di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Kemudian fokus permasalahan pada penelitian ini adalah penyimpangan perilaku pada pemuda di Kecamatan Kajen, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Peran POLSEK Terbanggi Besar dalam upaya menanggulangi tindakan kriminal di Desa Terbanggi Besar.

3. Penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah skripsi yang ditulis oleh Adey Silas Batmalo (2016) tentang “Tindak Kriminal Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember”. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama ingin melihat bentuk kriminalitas yang terjadi di masyarakat dan metode pengumpulan data yang digunakan sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah perbedaan tempat dan fokus permasalahan. Penelitian ini berlokasi di Lembaga pemsarakatan Kelas IIA Jember, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berlokasi di Desa Terbanggi Besar Lampung Tengah. Kemudian fokus permasalahan pada penelitian ini berfokus pada bentuk kriminalitas yang dilakukan anak yang mengalami perceraian orang tua, sedangkan pada penelitian yang akan

dilakukan berfokus pada peran POLSEK Terbanggi Besar dalam upaya menanggulangi kriminalitas di Desa Terbanggi Besar Lampung Tengah.

4. Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah skripsi yang ditulis oleh Yenni Meiliana (2011) tentang “Optimalisasi Peran dan Fungsi POLRI Dalam Mengatasi Tingginya Tingkat Kriminalitas di Lampung Tengah (Studi kasus pada Kinerja POLRES Lampung [Tengah Tahun 2010)”. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama berfokus pada peran dari pihak kepolisian dalam menanggulangi kriminalitas dan metode pengumpulan data yang digunakan sama-sama menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah perbedaan lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di POLRES Gunung Sugih Lampung tengah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Desa Terbanggi Besar Lampung Tengah.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan tertentu.¹¹ Metode penelitian adalah salah satu usaha yang digunakan seseorang peneliti untuk mengetahui keabsahan atau kebenaran suatu permasalahan sosial. Dapat dipahami metode penelitian digunakan oleh peneliti untuk

¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 2.

memudahkan dalam proses mendapatkan data yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Adapun metode penelitian terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Menurut (Denzin dan Lincoln, 1987) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan berbagai metode yang ada.¹² Adapun pendekatan dan prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan

1) Pendekatan sosiologis

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yakni peneliti menggunakan logika-logika dan teori-teori sosial, baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan struktur dan sistem dimasyarakat.¹³ Seperti dalam penelitian ini pendekatan sosiologis digunakan untuk menemukan serta dapat menjelaskan mengenai peran POLSEK Terbanggi Besar dalam menanggulangi kriminalitas di Desa Terbanggi Besar.

¹²Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 5.

¹³Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama (Pendekatan Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.100.

b. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian kualitatif memiliki langkah-langkah yang umumnya bersifat siklus. *Pertama*, adalah tahap mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, kemudian peneliti mendata sepiantas tentang informasi yang diperoleh. *Kedua*, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk menfokuskan pada permasalahan tertentu. *Ketiga*, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis yang hasilnya adalah tema yang dikonstruksikan berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru.¹⁴

Adapun prosedur penelitian yang sudah diuraikan diatas akan digunakan untuk meneliti peran POLSEK Terbanggi Besar dalam penanggulangan kriminalitas di Desa Terbanggi Besar sesuai dengan tahap-tahap yang sudah diuraikan.

2. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu naratif. Naratif bertujuan mencari informasi mendalam pada individu dan meminta seseorang individu atau lebih untuk menyediakan cerita tentang kehidupan mereka. Informasi yang telah didapat selanjutnya diceritakan kembali oleh peneliti dalam bentuk kronologi naratif. Narasi yang dihasilkan menggunakan

¹⁴Muchlisin Riyadi, "Karakteristik, Jenis dan Prosedur Penelitian Kualitatif" (On-Line) tersedia di <https://KajianPustaka.com> , diakses 16 Januari 2020.

pandangan dari kehidupan partisipan dengan pandangan kehidupan peneliti dalam narasi kolaborasi. Desain dalam penelitian ini menceritakan peran POLSEK Terbanggi Besar dalam menanggulangi kriminalitas di Desa Terbanggi Besar.

3. Tempat Penelitian, Populasi dan Sempel

Penelitian ini dilakukan pada POLSEK Terbanggi Besar Lampung Tengah. Peneliti memilih lokasi penelitian ini disebabkan tempat ini merupakan tempat tinggal peneliti, sehingga mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi dan memahami permasalahan yang terjadi.

a. Populasi

Populasi adalah seluruh anggota atau totalitas dari seluruh objek yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang ditetapkan oleh peneliti. Pada penelitian ini populasi diambil dari seluruh anggota POLSEK Terbanggi Besar Lampung Tengah. Adapun keseluruhan anggotanya tercatat sekitar 40 orang anggota.

b. Sempel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁵ Selanjutnya penggunaan sampel digunakan dengan menggunakan *Snowballing Sampling*, maksudnya adalah teknik

¹⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 13.

pengambilan sampel yang awalnya pengambilan sampel berjumlah kecil, tapi makin lama makin besar, berhenti sampai informasi yang didapatkan dinilai cukup.¹⁶ Sampel dalam penelitian ini dimulai dari kepala POLSEK kemudian kepada Wakil Kepala dan beberapa anggota POLSEK Terbanggi Besar. Peneliti juga memerlukan beberapa orang informan pendukung yaitu Kepala Desa Terbanggi Besar dan masyarakat sekitar berjumlah 2 orang.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan cara yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data guna menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian ini. Dalam prosedur pengumpulan data terdapat jenis dan sumber data yang di kumpulkan yaitu:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

- 1) Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research*. Jenis penelitian ini yaitu mengangkat data dan permasalahan yang ada dilapangan.¹⁷ Yaitu pada POLSEK Terbanggi Besar Lampung Tengah.
- 2) Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya peneliti semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil suatu kesimpulan yang

¹⁶Yuberti Antoni Saregar, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika dan Sains* (Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2017), h. 118.

¹⁷Ibid, h. 11.

berlaku secara umum.¹⁸ Penelitian ini, penulis menggambarkan POLSEK Terbanggi Besar dan Kewajibannya dalam menanggulangi kriminalitas yang terjadi di desa Terbanggi Besar Lampung Tengah.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu, sebagai berikut :

1) Sumber data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian, data ini merupakan data asli yang diperoleh dari sumber asalnya.¹⁹ Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari :

- a) Kepala POLSEK, Wakil Kepala dan beberapa anggota POLSEK Terbanggi Besar Lampung Tengah.
- b) Kepala Desa dan masyarakat sekitar Desa Terbanggi Besar.

2) Sumber data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen.²⁰ Untuk melengkapi data primer peneliti menggunakan sumber data berupa buku-buku yang terkait dalam penelitian ini, sumber arsip, catatan kriminal di POLSEK Terbanggi Besar.

c. Prosedur Pengumpulan Data

1) Observasi

¹⁸ Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gama Press, 1987), h. 52.

¹⁹ Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 14

²⁰ Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 6

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut.²¹ Penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan dimana peneliti hanya datang 2 atau 3 kali pada tempat penelitian guna mencari informasi keseharian informan dan mengetahui subjek penelitiannya secara langsung.

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara mewawancarai informan secara langsung, menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.²² Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 225.

²² Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h.

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Pada wawancara ini, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan. Analisis terhadap setiap jawaban dari informan tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penggalian data melalui data sekunder yang telah ada. Data sekunder ini dapat diperoleh dengan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara pengumpulan sumber-sumber data yang berasal dari buku, majalah, internet yang membahas tentang kriminalitas yang terjadi di Desa Terbanggi Besar Lampung Tengah. Bungin mengartikan bahwa dokumen secara eksplisit dibedakan secara gradual. Literatur adalah bahan-bahan yang diterbitkan, baik secara rutin maupun berkala. Sedangkan dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter.²³

²³Bungin B, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2001), h. 15.

Terkait dengan pemaparan tersebut maka peneliti nantinya akan mengumpulkan data melalui arsip-arsip, artikel, dan catatan terkait dengan tindak kriminal di Desa Terbanggi Besar Lampung Tengah.

5. Prosedur Analisis Data

Prosedur analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.²⁴ Dari analisa tersebut kemudian ditarik kesimpulan menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari uraian yang masih bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

6. Penarikan kesimpulan

Langkah berikutnya adalah dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proposi. Proses selanjutnya sebagai langkah terakhir yaitu pengambilan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara penganalisaan terhadap objek tertentu dengan bertitik dan pengamatan hal-hal yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

²⁴ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, h. 16.

BAB II

PERAN, KEPOLISIAN DAN KRIMINALITAS

A. Peran

1. Definisi Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dialogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.¹

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan pada peserta didik.²

Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan

¹Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 215.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 854.

tersebut. Dalam hal ini, peran merupakan aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga. Misalnya pada lembaga kepolisian yaitu berperan sebagai organisasi yang menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat.

2. Jenis-Jenis Peran

Jenis-jenis peran menurut Bruce J. Cohen, yaitu:³

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

³ S Fahrizal, Tersedia di:
<http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, (17 November 2020).

- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

3. Perbedaan Peran dan Kedudukan

Kedudukan sendiri sering diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan karena biasanya dia ikut serta dalam berbagai pola kehidupan yang beragam.

Peran (*role*) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat.⁴ Peran erat kaitannya dengan status, dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan.⁵ Peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran.

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan

⁴Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 1132.

⁵ Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 33.

dan begitu juga tidak ada kedudukan yang tidak mempunyai peran di masyarakat secara langsung.⁶

Setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam kehidupannya sesuai dengan pola lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang diperoleh dari kedudukan akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain.

B. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

1. Definisi POLRI

Istilah Kepolisian, dalam kamus Bahasa Indonesia, berasal dari kata “Polisi” adalah *pertama*, Badan pemeriksa yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar UU tersebut); *kedua*, anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dsb).⁷

Pengertian Kepolisian mengalami perkembangan terus terutama kepolisian telah digunakan dalam hubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik

⁶ Ralph Linton, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 268.

⁷ H. R Abdussalam, *Ilmu Kepolisian (Sebagai Ilmu Pengetahuan)*, (Jakarta : PTIK, 2014), h.

Indonesia Nomor : 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸

2. Tugas dan Fungsi POLRI

POLRI adalah sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban di masyarakat. Konsep tugas, fungsi dan peran POLRI yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorientasikan dengan perkembangan masyarakat.⁹

Fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

- a. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kewan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
- b. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

⁸*Ibid*, h. 16.

⁹Tasaripa, Kasman, *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian*, Diss. Tadulako University, 2013.

c. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

d. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:¹⁰

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

¹⁰ Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2014), h. 172.

- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perturan perundang-undangan.

C. Kriminalitas

1. Pengertian Kriminalitas

Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris *crime* yang berarti kriminalitas. Kriminal secara formal dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma sosial, undang-undang pidana, dan bertentangan dengan moral kemanusiaan, serta bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat. Dalam pandangan sosiologi, kriminalitas diartikan sebagai semua bentuk ucapan dan tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta merugikan dan mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomis, politis, maupun sosial-psikologis. Dari kedua paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kriminalitas merupakan segala bentuk kegiatan yang sifatnya merugikan, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik itu tercantum dalam undang-undang pidana maupun maupun yang sifatnya kondisional menurut pandangan masyarakat tertentu.¹¹

Kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Kejahatan termasuk perbuatan immoral, tapi hanya merupakan sebagian saja. Jika disoalkan tentang sifat hakekat dari perbuatan immoral terlihat bahwa ada dua sudut pandang. *Pertama* subyektif, jika dipandang dari sudut orangnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; *kedua* obyektif, jika dipandang dari sudut masyarakat adalah merugikan masyarakat. Penyelidikan mengenai hal ini

¹¹ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016), h. 128.

oleh sosiologi khususnya ethnologi membuktikan, bahwa immoral berarti anti-sosial dipandang dari sudut masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti-sosial, yang oleh Negara ditentang dengan sadar.¹²

2. Bentuk dan Jenis Kriminalitas

Penjelmaan atau bentuk dan jenis kejahatan itu dapat dibagi-bagikan dalam beberapa kelompok, yaitu :¹³

- a. Rampok dan Gangsterisme, yang sering melakukan operasi-operasi kejahatannya secara bersama-sama dengan organisasi-organisasi legal.
- b. Penipuan-penipuan; permainan-permainan dalam bentuk judi dan perantara-perantara “kepercayaan”, pemerasan (*blackmailing*), ancaman untuk mempublikasi skandal dan perbuatan manipulatif.
- c. Pencurian dan Pelanggaran; perbuatan kekerasan, perkosaan, pembegalan, penjambretan/pencopetan, perampokan, pelanggaran lalu lintas, pajak, bea cukai dan lain-lain.
- d. *Criminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

¹² W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta : PT Pembangunan cetakan ke-8, 2015), h. 20.

¹³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 149.

3. Faktor-Faktor Penyebab Kriminalitas

Faktor penyebab terjadinya kriminalitas dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor dari dalam diri pelaku (internal) dan faktor dari luar diri pelaku (eksternal), berikut merupakan penjabarannya :¹⁴

a. Faktor Internal

Pada faktor ini dijelaskan bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan yaitu timbul dari diri pelaku sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor-faktor dari dalam tersebut antara lain :

- 1) Faktor biologis, secara *Genothype* (warisan orang tua) dan *Phenotype* (hasil pembawaan yang diwarisi dari orang tua yang telah berkembang dengan pengaruh-pengaruh dari luar).
- 2) Faktor pembawaan kriminal, yang diartikan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan memiliki sifat jahat pembawaan, karena selalu ada interaksi antara pembawaan dan lingkungan.
- 3) Usia, kecenderungan untuk berbuat anti sosial meningkat selama masih sekolah dan memuncak antara usia 18-25 tahun, menurun perlahan-lahan pada usia 40 tahun, lalu turun drastis untuk berhenti pada umur usia tua.

¹⁴ Hamzah Andi, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 64.

b. Faktor Eksternal

Dalam faktor ini dijelaskan bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan yaitu timbul dari luar diri pelaku sendiri.

Faktor-faktor tersebut yaitu :

- 1) Faktor lingkungan, dimana lingkungan merupakan faktor potensial yang dapat memberi pengaruh terjadinya tindak kriminal tergantung dari suasana pembawaan lingkungan, baik lingkungan tetap maupun lingkungan sementara.
- 2) Kemiskinan, merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kriminalitas karena adanya keterbatasan memenuhi kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan) sehingga untuk memenuhinya seseorang melakukan berbagai cara termasuk dengan cara yang melanggar ketentuan hukum.
- 3) Pendidikan, merupakan salah satu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan dimana dengan pendidikan syarat pekerjaan dapat terpenuhi. Dengan demikian seseorang yang mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhannya. Tetapi apabila seseorang tidak mendapat pendidikan yang cukup ia akan tersingkir dari dunia kerja yang menyebabkan ia menjadi pengangguran dan mendorong seseorang tersebut untuk melakukan tindak kriminalitas agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

- 4) Bacaan harian dan film, merupakan faktor krimogenik yang kuat, mulai dari cerita-cerita dan gambar-gambar eortis dan pornografik, buku-buku picisan lain dan cerita-cerita detektif dengan penjahat sebagai pahlawannya, serta penuh dengan kejadian berdarah. Pengaruh dari bacaan tersebut adalah dapat menciptakan kecenderungan untuk dipraktekkan secara langsung oleh si pembaca. Di samping bacaan-bacaan tersebut, film (termasuk TV) juga dianggap dapat menyebabkan pertumbuhan kriminalitas.

4. Cara Menanggulangi Kriminalitas

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: a). Penerapan hukum pidana (*criminal law application*); b). Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan c). Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁵ Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua pendekatan, pendekatan penal (hukum pidana) dan pendekatan non penal (di luar hukum pidana). Jika dilihat dari upaya penanggulangan yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels maka butir (b) dan (c) dapat dimasukkan ke dalam pendekatan nonpenal.

¹⁵Nyoman Serikat Putra Jaya, “Pembaharuan Hukum Pidana”, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017), h. 24.

Upaya penanggulangan secara penal policy lebih menitikberatkan pada upaya represif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan sesudah kejahatan terjadi sedangkan non-penal policy lebih menitikberatkan pada upaya preventif atau upaya pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Integrasi dua pendekatan ini disyaratkan dan diusulkan dalam *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.¹⁶

Pada kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *social welfare* dan *social defence*. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Menurut Hoefnagel upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara: *Pertama, Criminal application* atau penerapan hukum pidana,

¹⁶Jamilah, Asiyah, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Dari Perspektif Politik Kriminal di Indonesia", JUSTITIA JURNAL HUKUM 4.1, 2020.

contohnya: penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya. *Kedua, Preventif without punishment* atau pencegahan tanpa pidana, contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat. *Ketiga, Influencing views of society on crime and punishment* atau mass media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media, contohnya: mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimanadelik itu dan ancaman hukumannya.¹⁷

Langkah-langkah preventif sebagai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana menurut Baharuddin Lopa meliputi:*pertama*, Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan; *kedua*, Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan; *ketiga*, Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat; *keempat*, Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan *represif*

¹⁷Barda Nawawi Arif, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana”, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), h. 2.

maupun *preventif*;kelima, Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.¹⁸

Solusi *preventif* adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi *supresif* adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Menghilangkan kecendrungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung karena rasa takut disebut hukuman.

Hal tersebut terkait dengan pandangan Jeremy Bentham, bahwa yang mengemukakan bahwa Tujuan hukuman adalah mencegah terjadinya kejahatan serupa, dalam hal ini dapat memberi efek jera kepada pelaku dan individu lain pun untuk berbuat kejahatan. Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun.

¹⁸Baharuddin Lopa, "*Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*", (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2001), h. 16-17.

Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan hanya dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat, tapi harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan. Termasuk dalam hal ini adalah upaya preventif harus menjadi tugas seluruh masyarakat.

Solusi preventif pada intinya diperlukan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang terjadinya kejahatan. Pendekatan ini penting dilakukan dalam rangka menunjang pengawasan yang efektif karena selama ini banyak aturan hukum di Indonesia yang masih bersifat umum sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran. Salah satu titik tolak untuk melakukan upaya solusi preventif tersebut adalah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, diskresi yang limitatif, obyektifitas, pembatasan perilaku yang spesifik, serta partisipasi masyarakat dan ketersediaan mekanisme pengecekan dan penyeimbangan di dalamnya. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi memegang peranan penting dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam solusi preventif.

E.H. Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.¹⁹

Metode untuk mencegah *the first crime*, Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali atau *the first crime* yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* atau preventif. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.²⁰

D. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial diabad sekarang. Tokoh-tokoh yang

¹⁹Ramli Atmasasmita, "*Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*", (Bandung : Alumni, 1983), h. 66.

²⁰Rohman Arif, "*Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat (Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan 21.2)*", 2016, h. 125-134.

pertama kali mencetuskan fungsional yaitu August Comte, Emile Durkheim dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup.²¹

Teori fungsionalismestrukturalmengemukakan bahwa semua bagian di masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing dalam lingkungan masyarakat tersebut. Semua bagian masyarakat saling bekerjasama untuk membangun tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Jika terdapat Satu elemen dari masyarakat yang tidak menjalankan fungsi atau tugasnya dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakteraturan disebuah keadaan sosial. Pada akhirnya ketidakteraturan itu menimbulkan suatu bentuk masalah sosial.²²

Teori fungsionalisme struktural, memiliki dua pandangan tentang masalah sosial. Kedua pandangan tersebut adalah patologi sosial dan disorganisasi sosial.²³ Dalam patologi sosial, permasalahan sosial dimaksudkan sebagai penyakit dalam diri manusia. Penyakit yang timbul tersebut, penyebabnya ialah salah satu bagian tubuh tidak mampu bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya. Penyakit sosial seperti kriminalitas, kekerasan, kenakalan remaja, dan

²¹ Rusdi Anto, “*Teori-Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural*”, tersedia di: https://www.researchgate.net/publication/326610706_Teori-teori_Sosiologi_hukum_Fungsional_Struktural (diakses 20 Januari 2021).

²² George Ritzer, *Teori Sosiologi: dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 401.

²³ *Ibid*, h. 401.

lain-lain tumbuh dalam masyarakat karena peran-peran sosial seperti institusi keluarga, agama, ekonomi dan politik sudah tidak berfungsi maksimal dalam mensosialisasikan nilai dan norma yang baik, sehingga hal tersebut akan merusak tatanan fungsi sosial di masyarakat yang stabil. Sedangkan menurut pandangan disorganisasi sosial, masalah sosial bersumber dari perubahan sosial yang cepat, yang kemudian mempengaruhi norma sosial.

Perlu adanya peran dari pihak yang berwajib agar dapat mengatur tatanan sosial menjadi stabil kembali. POLSEK Terbanggi Besar Dalam hal ini, berperan penting untuk menjaga kestabilan dimasyarakat. Sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu pemeliharaan kemandirian dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Melalui upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh POLSEK Terbanggi Besar diharapkan masyarakat dapat menyadari dampak buruk yang ditimbulkan akibat melakukan kejahatan, sehingga nantinya akan menciptakan kondisi masyarakat yang stabil.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung : Remadja Karya CV, 1987.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2001.
- Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- Bungin B, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- George Ritzer, *Teori Sosiologi: dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta : Gama Press, 1987.
- Hamzah Andi, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- H. R Abdussalam, *Ilmu Kepolisian (Sebagai Ilmu Pengetahuan)*, Jakarta : PTIK, 2014.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung : CV Mandar Maju, 1996.
- Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasyarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, Jakarta : Sekjen MPR RI, 2009.
- Maleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017.
- Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016.
- Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Ralph Linton, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1984.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama (Pendekatan Teori dan Praktek)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Topo Santoso dan Eva, *Kriminologi*. Jakarta : R. Grafindo Persada, 2004.
- Wahyu Mulyono, *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012.
- W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : PT Pembangunan cetakan ke-8, 2015.
- Yuberti Antoni Saregar, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika dan Sains*, Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2017.
- Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2014.

Sumber Jurnal:

- Jamilah, Asiyah, dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Dari Perspektif Politik Kriminal di Indonesia*, JUSTITIA JURNAL HUKUM 4.1, 2020.

Ramli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1983).

Rohman Arif, *Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat (Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan 21.2)*, 2016.

Tasaripa, Kasman, *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian*, Diss. Tadulako University, 2013.

Sumber Online:

Muchlisin Riyadi, “*Karakteristik, Jenis dan Prosedur Penelitian Kualitatif*” (On-Line) tersedia di <https://KajianPustaka.com>, diakses 16 Januari 2020.

Ray Pratama, *Upaya Penanggulangan Kejahatan*, Tersedia di: <http://raypratama.blogspot.com>, (29 November 2020).

Rusdi Anto, “*Teori-Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural*”, tersedia di: https://www.researchgate.net/publication/326610706_Teori-teori_Sosiologi_hukum_Fungsional_Struktural (diakses 20 Januari 2021).

Seputar Pengetahuan. “*Peran : Pengertian, Menurut Para Ahli, Konsep dan Jenisnya*”. (On-line), tersedia di : <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2019/10/peran.html> (28 April 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Th 2002. *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. (diakses 10 Desember 2018).

Headline Lampung, *POLRES Lampung Tengah Ungkap Hasil Operasi Sikat Krakatau 2020*, tersedia di: <https://headlinelampung.com/arsip/25169> (diakses 20 Oktober 2020)

Wawancara:

Faisol Rohim, Kanit Intelkam POLSEK Terbanggi Besar, *Wawancara*, 15 Oktober 2020.

Haidir, Kepala Desa Terbanggi Besar, *Wawancara*, 5 Oktober 2020.

Joko Triono, Kanit Provos POLSEK Terbanggi Besar, *Wawancara*, 15 Oktober 2020.

Ngadiyo M, KSPKT 1 POLSEK Terbanggi Besar, *Wawancara*, 15 Oktober 2020.

Sobirin, Kepala Dusun 1 Desa Terbanggi Besar, *Wawancara*, 7 Oktober 2020.

Sofyan Badri, Kepala dusun 2 Desa Terbanggi Besar, *Wawancara*, 7 Oktober 2020.

Sutana Yusuf, Kepala POLSEK Terbanggi Besar, *Wawancara*, 14 Oktober 2020.

Uus Usman, Wakil Kepala POLSEK Terbanggi Besar, *Wawancara*, 14 Oktober 2020.

Zulkarnain, Kasi Umum POLSEK Terbanggi Besar, *Wawancara*, 14 Oktober 2020.